

EMPOWERMENT OF COOPERATIVES AND MSMEs IN BOGOR CITY BASED ON COOPERATIVE ACCOUNTING AND CAPITAL PLANNING

Indra Cahya Kusuma¹⁾

Ade Budi Setiawan¹⁾

Maria Ulfa¹⁾

E-mail : indracahyasmantibo84@gmail.com

adebudisetiawan@yahoo.co.id

¹⁾Lecturers of Economics Faculty in Djuanda University

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the accounting ability, particularly in financial management, preparation of financial statements, and capital planning and management, of the cooperative and MSME's management/businessmen in Bogor City. Cooperatives and MSMEs in Bogor were the object of this study. A quantitatively descriptive approach was used. Sampling was done by using a purposive sampling and simple random sampling method. A total of 163 cooperatives and 379 SMEs were selected as samples. Data were analysed by using the multiple linear regression. Results showed that there was a simultaneous and partial effect of cooperative accounting and capital planning on the success of the empowerment of cooperatives in Bogor. As for the MSME entrepreneurs, it was found that many of them still did not understand how to create financial statements and to make good capital planning. Therefore, a sustainable empowerment from the government institutions through trainings, mentoring, and capital assistance was required.

Keywords: *Cooperative Accounting, Capital Planning and Empowerment*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pengurus/pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Kota Bogor dalam bidang akuntansi, khususnya pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan serta perencanaan dan pengelolaan permodalan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan obyek penelitian Koperasi dan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Dengan jumlah sampel sebanyak 163 koperasi dan 379 UMKM. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan dan parsial terdapat pengaruh akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota

Bogor. Sedangkan untuk pelaku usaha UMKM masih banyak yang belum mengerti cara membuat laporan keuangan serta belum dapat merencanakan permodalan dengan baik dan diperlukan upaya pemberdayaan berkesinambungan dari instansi pemerintah melalui pelatihan, pendampingan dan permodalan.

Kata Kunci : Akuntansi Koperasi, Perencanaan Permodalan dan Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2011, UMKM dan koperasi mampu menyerap tenaga sebanyak 85,4 juta pekerja atau sekitar 96,8% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan nilai kontribusi UMKM dan koperasi terhadap pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) telah mencapai Rp 1,778 triliun atau 53% dari total PDRB Indonesia. Berdasarkan data BPS Kota Bogor tahun 2011, potensi UKM antara lain dapat dilihat dari jumlah pelaku usahanya yang relatif banyak, kemampuannya menunjang kegiatan kepariwisataan dan juga kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor. Dari segi Koperasi jumlah yang terdata sampai

dengan akhir tahun 2011 ada sebanyak 774 koperasi dan jumlah UMKM yang masuk pembinaan Pemerintah Kota Bogor mencapai 32.901 UMKM. Begitu pula jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor UMKM, sampai tahun 2011 telah mencapai 58.249 orang. Sedangkan dari jumlah asset investasi capaian UMKM di tahun 2011 berkisar pada angka Rp 575,397 miliar lebih.

Ada beberapa kendala dan keterbatasan Koperasi dan UMKM di Kota Bogor sampai saat ini relatif sulit berkembang dengan baik. Hal ini dipengaruhi antara lain; 1) terbatasnya akses, kapasitas dan kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengenali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya produktif. 2) Rendahnya produktivitas mengakibatkan lemahnya daya saing Koperasi dan UMKM. 3) Rendah kualitas kelembagaan/formalisasi usaha. 4) Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara produktif, efektif dan efisien dan Lemahnya entrepreneurship dan Kualitas SDM. 5) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebutuhan masyarakat Barat terutama Eropa.

Sebagai sebuah konsep, *empowerment* sifatnya masih terlalu umum. Sehingga apabila tidak hati-hati kajian terhadap konsep ini diibaratkan seperti menyentuh cabang atau daun tetapi tidak menyentuh akar permasalahan baik yang sifatnya mendasar maupun yang terjadi dalam suatu proses.

Ada dikotomi antara memberdayakan dengan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Sumodiningrat(1997).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberi inovasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Karena itu memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan yaitu :

1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi (berdaya) untuk berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan penyediaan input (masukan) serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi lemah.

Dengan demikian untuk menciptakan suatu wilayah yang berdaya perlu adanya pemihakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang diarahkan secara langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Konsep *empowerment* muncul karena adanya kegagalan dan harapan yaitu gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan dengan harapan adanya pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, persamaan antara generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman, 1992).

Menurut Argyris (1998) pemberdayaan merupakan program yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan karena membutuhkan komitmen dari dalam yang kuat. Keterkaitan yang kuat antara komitmen dan pemberdayaan disebabkan karena adanya keinginan dan kesiapan individu-individu dalam organisasi untuk diberdayakan dengan menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab. Argyris membagi komitmen menjadi dua yaitu komitmen eksternal dan komitmen internal.

Komitmen eksternal dibentuk oleh lingkungan kerja. Komitmen ini muncul karena adanya tuntutan terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh para karyawan

yang menghasilkan adanya *reward* dan *punishment*. Peran manajer sangat vital dalam menentukan timbulnya komitmen ini karena belum adanya kesadaran individual atas tugas yang diberikan. Sedangkan komitmen internal merupakan komitmen yang berasal dari diri seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas, tanggung jawab dan wewenang berdasarkan pada alasan dan motivasi yang dimilikinya. Munculnya komitmen internal sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan dan lingkungan organisasi dalam menumbuhkan sikap dan perilaku professional dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaan.

Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Undang-Undang No. 25/1992 pasal 1 berbunyi bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonomi yang dimiliki oleh para anggotanya sebagai rekanan/pelanggan dari perusahaan koperasi.

Karakteristik Koperasi

Hanel (1989) menyatakan bahwa karakteristik dasar dari organisasi koperasi adalah :

1. Kesukarelaan untuk bekerja sama, hal ini dapat berarti tidak ada keanggotaan yang bersifat keharusan secara tidak langsung atau secara bersyarat
2. Kesamaan hak dan kerjasama
3. Kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan individu

Wirasasmita (1992:5-6) menyatakan bahwa untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas dan berhasil sesuai dengan karakter dasarnya sekaligus dapat berkembang dalam situasi persaingan yang ketat. Kriteria pengembangan koperasi dapat diukur dengan besarnya volume usaha, modal dan kegiatan usaha serta nilai asset, baik yang dimiliki koperasi maupun anggotanya.

Prinsip koperasi menurut Hendar dan Kusnadi (2005:2) :

- a. Keanggotaan yang bersifat terbuka (*open memberships and voluntary*)
- b. Pengawasan secara demokratis (*democratic control*)
- c. Bunga yang terbatas atas modal (*limited interest of capital*)
- d. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (*proportional distribution of surplus*)
- e. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (*trading in cash*)
- f. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik (*political, racial, religious neutrality*)

- g. Barang-barang yang dijual harus merupakan barang asli, tidak rusak atau palsu (*adulterated goods forbidden to sell*)
- h. Pendidikan kepada anggota secara berkesinambungan (*promotion of education*)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya yang dapat menimbulkan defenisi usaha kecil dari beberapa segi.

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,00. Ciri-ciri usaha mikro:

1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan

- keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- 5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- 6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Berdasarkan Status Kepemilikan yaitu pengusaha yang berbentuk perseorangan, bila berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, yang didalamnya termasuk koperasi.

Akuntansi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah

usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. (PSAK 27)

Foy (1994) telah mengungkapkan empat kemampuan atau skill manajerial yang perlu dimiliki oleh pemimpin suatu organisasi, yaitu:

1. *Conceptual Skills*, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi.
2. *Human Skills*, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok.
3. *Administratif Skills*, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengawasan.
4. *Technical Skills*, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur atau teknik-teknik dari bidang tertentu, misalnya akuntansi, pemasaran, dan lain-lain.

Arens (2003:13), "Accounting is the recording, classifying, and summarizing of economic events in a logical manner for the purpose of providing financial information for decision making" Dengan demikian akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan informasi

keuangan yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Untuk mengetahui sejauh mana koperasi dan UMKM mampu mengembangkan usahanya, dapat dilihat dari kondisi kinerjanya yang dapat diukur dari berbagai macam pendekatan tergantung dari sisi mana suatu analisis digunakan Hanel (1998). Dalam kajiannya tentang kinerja koperasi mengungkapkan pengukuran kinerja koperasi dibagi dalam dua bagian: Pertama menggunakan analisis finansial yang meliputi; rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, rasio profitabilitas, kegiatan usaha, permodalan, serta peranan usaha penunjang. Sedangkan non finansial dianalisis melalui; partisipasi anggota, produktifitas karyawan dan manajer koperasi.

Permodalan

Pada awalnya orientasi pengertian modal adalah *physical oriented* (Riyanto, 1995:17). Dalam pengertian ini modal diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Menurut Riyanto (1995:17) modal dalam perkembangannya menjadi bersifat *non physical oriented* yakni pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia memberikan batasan mengenai pengertian modal kedalam dua jenis modal yaitu; modal keuangan dan modal fisik. Seperti diungkapkannya dalam standar Akuntansi Keuangan, pengertian

kedua konsep modal adalah sebagai berikut: Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan kata akatifa bersih atau ekuitas perusahaan. Menurut konsep modal fisik, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada, misalnya unit output perhari.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Bogor. (2) Untuk mengetahui penerapan akuntansi koperasi bagi Koperasi dan UMKM di Kota Bogor. (3) Untuk mengetahui perencanaan permodalan bagi Koperasi dan UMKM di Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan data yang dapat mewakili, dilakukan penarikan sampel. Penarikan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* (kriteria tertentu) dan *simple random sampling*, Natsir (2003). Dilakukan pertama dengan pengambilan sampel dari populasi umum Koperasi sebanyak 724 buah dan UMKM sebanyak 32.901 atau secara keseluruhan sebanyak 33.625 pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Kota Bogor berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kota Bogor 2011.

Kriteria jumlah Koperasi dan UMKM yang masuk sebagai binaan dan terdata di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sampai dengan

tahun 2012 ada sebanyak 275 Koperasi Aktif dan 11.997 UMKM. Dengan menggunakan *simple random sampling* diperoleh sampel sasaran sebanyak 163 koperasi dan 379 UMKM.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1 menunjukkan definisi operasional masing-masing variabel penelitian.

Tabel: 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Pengetahuan Akuntansi Koperasi (X1)	Pengetahuan tentang akuntansi koperasi adalah segala informasi yang diketahui baik yang diperoleh dari hasil belajar maupun dari pengalaman secara langsung maupun tidak langsung meliputi: prinsip, metode, dan prosedur tentang akuntansi koperasi, dalam hal ini adalah standar akuntansi perkoperasian (PSAK No. 27).	1. Dapat menyusun laporan keuangan 2. Pencatatan transaksi di buku harian 3. Pencatatan transaksi di buku jurnal 4. Pencatatan transaksi di buku besar 5. Penyajian laporan keuangan	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Perencanaan Permodalan (X2)	Melakukan perencanaan penggunaan modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (UU tentang Koperasi No. 25/1992)	1. Perencanaan penggunaan dana 2. Modal sendiri 3. Dana cadangan usaha 4. Bantuan dari lembaga pemerintah 5. Kemudahan memperoleh pinjaman 6. Modal pinjaman	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Keberhasilan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Y)	Keberhasilan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktifitas yang dilakukan dan menggambarkan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.	1. Adanya perencanaan 2. Peningkatan laba 3. Peningkatan dana 4. Peningkatan usaha 5. Peningkatan aset 6. Pelatihan & pendidikan 7. Kerjasama 8. Kontribusi pembangunan 9. Kesejahteraan anggota/karyawan	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan bersifat deskriptif-kuantitatif. Yang dimaksud dengan penelitian bersifat deskriptif adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek

penelitian (kondisi Koperasi dan UMKM dilihat dari Akuntansi Koperasi apakah sudah dijalankan, terutama penyusunan laporan keuangan serta aspek perencanaan permodalan). Sedangkan pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah

dengan menggunakan statisti regresi linier berganda (*multiple regression linier*), Sugiono (2007) dengan maksud untuk melihat keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM berbasis akuntansi koperasi dan perencanaan modal. Rumusan uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = koefisien regresi

X_1 = Akuntansi Koperasi

X_2 = Perencanaan Permodalan

Y = Keberhasilan
Pemberdayaan Koperasi

ε = eror/variabel pengganggu

HASIL ANALISIS

Tabel: 2 Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2102,678	2	1051,339	42,069	,000 ^b
	Residual	2923,914	117	24,991		
	Total	5026,592	119			

a. Dependent Variable: Kbrhasilan Pmbrdayaan

b. Predictors: (Constant), Perencanaan Modal, Akuntansi Koperasi

Sumber: Data diolah 2012

Pengujian Model Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pengaruh Faktor Akuntansi Koperasi (X_1) Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Koperasi (Y)

Hasil pengujian pada tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} untuk faktor akuntansi koperasi sebesar 3,199 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($\alpha = 5\%$), sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas (db) 2 untuk pengujian dua sisi diperoleh sebesar 1,980. Dengan membandingkan nilai t_{hit}

Pengujian Model Regresi Secara Simultan (Uji F)

Hasil pengujian pada tabel 2 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,069 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($\alpha = 5\%$), sedangkan nilai F_{tabel} diperoleh sebesar 3,09. Dengan membandingkan nilai F_{hit} ($56,990$) > F_{tab} (3,09) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi.

(3,199) > t_{tab} (1,980) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor akuntansi koperasi terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi.

Pengaruh Faktor Perencanaan Permodalan (X_2) Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Koperasi (Y)

Hasil pengujian pada tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} untuk faktor perencanaan permodalan sebesar

7,851 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($\alpha = 5\%$), sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas (db) 2 untuk pengujian dua sisi diperoleh sebesar 1,980. Dengan membandingkan nilai t_{hit} (7,851) > t_{tab} (1,980) maka H_0

ditolak dan H_a diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi.

**Tabel 3 Pengujian Koefisien Regresi secara parsial
Coefficients(a)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27,684	3,789		7,306	,000
1 Akuntansi Koperasi	,244	,076	,230	3,199	,002
Perencanaan Modal	,890	,113	,563	7,851	,000

Sumber : Data diolah 2012

Akuntansi Koperasi Bagi UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha UMKM di Kota Bogor tidak tahu dan mengerti cara membuat dan menyusun laporan keuangan dan bagaimana cara mencatatnya. Faktor kendala ketidak tahuan pelaku usaha UMKM antara lain adalah tingkat pendidikan rata-rata yang rendah, ketidak tahuan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Koperasi dan UMKM, dan berusaha dengan tujuan mencukupi kebutuhan hidup sehingga banyak pelaku usaha jarang melakukan difersivikasi dan inovasi usaha, sehingga diperlukan adanya suatu pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang baik.

Perencanaan Permodalan Bagi UMKM

Sebagian besar pelaku usaha UMKM Kota Bogor dalam melakukan usaha tidak pernah merencanakan berapa kebutuhan modal yang akan digunakan dan berapa kecukupan modal untuk

kedepannya. Sehingga pada saat pelaku usaha UMKM membutuhkan dana untuk memperluas usaha dengan meminjam lembaga perbankan terkendala dengan data-data laporan usaha yang diminta oleh pemberi dana. Disamping itu jarang nya pelatihan maupun pendampingan yang diberikan oleh intitusi pemerintah yang terkait dengan permasalahan UMKM, terutama usaha mikro sulit untuk berkembang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian secara simultan dan parsial terdapat pengaruh akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi di Kota Bogor. Sedangkan untuk pelaku usaha UMKM masih banyak yang belum mengerti cara membuat laporan keuangan serta belum dapat merencanakan permodalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik, 1992, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arens AA. and Loebecke, 2003. *Auditing*, Precentin Hall, New York.
- Argrys Chris (1998), "Empowerment: The Emperor New Clother", Harvard Business Review, May-Jun, p.100
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010-2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2011, *Kota Bogor Dalam Angka 2009-2011*, BPS, Bogor.
- Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London:Grower Publishing Company.
- Friedman John, 1992, *Empowerment, The Politics of alternative Development*, USA: Oxford University Press.
- Hanel, Alfred, 1989, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-negara Berkembang*. Edisi Pertama, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hendar dan Kusnadi, 2005, *Ekonomi Koperasi*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor, 2012.
- Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM No.129/Kep/M.KUKM/XI/2002/Tanggal 19 November 2002, Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi.
- Natsir M., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riyanto, Bambang, 1995, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian*. ALFABETA. Bandung.
- Tambunan, Tulus, 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, 2008, "Prospek Perkembangan Koperasi Kedepan : Masih Relevankah Koperasi di Era Modernisasi Ekonomi?", Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti.
- Tuti Trisnawati, 2009, *Akuntansi untuk Koperasi dan UKM*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.
- Wirasasmita Yuyun, 1992, *Strategi Pembangunan Sektor Koperasi yang Dapat Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Koperasi*, Dalam Rusidi dan Maman Suratman (Eds), *Pokok-Pokok Pikiran tentang Pembangunan Koperasi*. UPT Penelitian Bandung.

